

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN BUNGO  
PROVINSI JAMBI**

Anggika Wahyu Abiyoso. S  
NPP. 30.0290

*Asdaf Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi  
Program Studi Keuangan Publik*

Email:

Pembimbing Skripsi: Dr. Mulyadi, SP., M.Si

**ABSTRACT**

**Problems Statement/Background (GAP)** : This research was motivated by a phenomenon that occurred at the Bungo Regency Regional Financial and Asset Management Agency where in 2017 and 2020 received a Qualified Opinion (WDP) on the presentation of financial statements with allegations that there are still obstacles to the presentation of reports finance that is influenced by the applied regional financial accounting system variables. **Purpose** : This study aims to determine how much influence the regional financial system has on the financial quality reports of the Bungo Regency local government. **Method**: The method used in this study is a quantitative method with an explanatory type. The variables used in this study are the Regional Financial Accounting System and the Quality of Regional Government Financial Reports. In terms of supporting this research, the tool used to obtain statistical data is Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) 25.0 for Windows. **Result** : The results of this study indicate that the H1 hypothesis is accepted or the Regional Financial Accounting System has a significant effect on the Quality of Regional Government Financial Statements with a large influence of 60.4% and the rest is influenced by other variables outside the research. **Conclusion** : Based on the results of interviews with researchers with informants, the better the Regional Financial Accounting System implemented by the Bungo Regency Regional Financial and Asset Management Agency so that the Regional Government Financial Reports are of higher quality.

**Keywords**: Regional Financial Accounting System, Quality of Regional Government Financial Statements, Regional Financial and Asset Management Agency

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar belakang (GAP) :** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo dimana pada tahun 2017 dan 2020 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas penyajian laporan keuangan dengan dugaan masih terdapat kendala atas penyajian laporan keuangan yang dipengaruhi oleh variabel sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bungo. **Metode :** Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan jenis eksplanatori. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam hal mendukung penelitian ini, alat yang digunakan untuk mengolah data statistik yaitu *Software Statistical Product and Service Solution (SPSS) 25.0 for Windows*. **Hasil/Temuan :** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis  $H_1$  diterima atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan besar pengaruh yang diberikan sebesar 60,4% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. **Kesimpulan :** Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan informan maka semakin baik Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semakin berkualitas.

**Kata Kunci :** Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Paska Reformasi, keleluasaan pemerintah daerah untuk mengatur sendiri hal-hal yang berkaitan dengan daerahnya mulai tampak. Dengan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian pada tanggal 15 Oktober 2004 diubah dan ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penggantinya menjadi bukti konkrit bahwa pemerintah pusat dengan serius mewujudkan sistem desentralisasi. Pembangunan daerah dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah masing-masing, perwujudan efisiensi dalam semua sisi baik penyelenggaraan roda pemerintahan, hingga pembangunan nasional.

Termasuk pada sektor keuangan dimana merupakan sektor yang paling esensial dalam suatu organisasi pemerintahan, pemerintah daerah pun dapat mengelola keuangan daerah secara mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahnya. Seluruh bentuk pengalokasian anggaran dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap praktiknya. Salah satu media untuk melihat hasil kegiatan yang berhubungan dengan keuangan daerah yaitu dengan melihat *output* laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Laporan keuangan merupakan patokan apakah pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah dituntut menerbitkan laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu teori yang dikemukakan oleh Sinurat (2018, 119-120) menyebutkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas yaitu laporan yang memenuhi kualitas indikator relevan, andal, dapat di bandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sebuah organisasi atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada periode tertentu. Sama halnya di pemerintahan daerah, laporan keuangan memiliki fungsi sebagai alat ukur untuk dapat melihat apakah suatu pemerintahan telah terlaksana dengan baik, sehingga pemerintah daerah wajib mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang sangat diharapkan dapat memberikan informasi keuangan yang lazim untuk memenuhi kebutuhan penggunaanya. Laporan keuangan itu juga nantinya digunakan sebagai acuan dalam membuat kebijakan ataupun pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil (GAP Penelitian)**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diperiksa secara periodik yang kemudian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nya diberikan nilai berupa Opini dari BPK diantaranya, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Opini Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Menurut berita pada laman *website* resmi Kabupaten Bungo yang diunggah pada 2019, 29 Maret menjelaskan bahwa selama ini persoalan pengelolaan aset menjadi salah satu yang jadi permasalahan belum bisa diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK. Begitu pula pada laman berita *jambiupdate.co* yang diterbitkan pada 2018, 29 Mei yang mengutip perkataan dari Safrudin sebagai Wakil Bupati Bungo yang menerangkan bahwa permasalahan yang paling menonjol yaitu masalah aset, meskipun sebenarnya Pemerintah

Kabupaten Bungo sudah berusaha melakukan penataan secara rutin pada aset-aset yang menjadi catatan termasuk melakukan penghapusan aset.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan kajian oleh seseorang dimana permasalahan yang dikaji sama dengan judul permasalahan yang digunakan oleh penulis untuk membandingkan dan menjadi sebuah gambaran oleh penulis dalam pengerjaan hasil sebuah penelitian. Dalam hal ini penulis mencantumkan lima hasil penelitian sebelumnya yaitu Penelitian Mutmainnah (2020) yang dimana memfokuskan suatu penelitian berupa pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, Ansir Launtu (2021) yang dimana penelitian ini memfokuskan pada Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa dan hasil penelitian yang ditunjukkan berupa secara persial dan simultan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gowa, Siti Fatimah (2016) yang dimana memfokuskan sebuah penelitian berupa pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Lahat sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Kartika Dwi Indrayani, Harjanti Widiastuti (2022) dalam penelitian ini yang dimana memfokuskan suatu hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dalam memoderasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Anissa Putri Prabangsari (2018) dimana Penelitian ini memfokuskan pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

### **1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian berbeda dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan berupa teknik uji pada metode kuantitatif yang digunakan, variabel penelitian, dan lokasi tempat penelitian dilaksanakan. Teknik uji penulis menggunakan Analisis Regresi Linear Sederhana, Uji Signifikansi, dan Koefisien Determinasi. Variabel penelitian juga berbeda dimana penulis hanya fokus pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai variabel bebas, tidak ada variabel lain. Penulis mengambil judul penelitian ini dengan maksud untuk menemukan pengaruh sistem akuntansi yang diterapkan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kota asal penulis yang menjadi lokus penelitian agar pemerintah daerah dapat mempertahankan opini WTP BPK.

## **1.5 Tujuan**

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang berdasarkan latar belakang dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo.

## **II. METODE**

Berdasarkan berbagai jenis penelitian untuk mendapatkan uraian tentang Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo akhirnya peneliti memutuskan untuk menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2018: 7) bahwa: Metode Kuantitatif disebut sebagai metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah menjadi tradisi dalam suatu metode penelitian. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitiannya berupa kumpulan angka dan analisis menggunakan statistik.

Sugiyono (2011: 10) menyatakan bahwa: Penelitian eksplanatori merupakan suatu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan kausal antara variabel yang satu dengan variabel yang lain melalui pengujian hipotesis. Penelitian explanatory digunakan dalam menganalisis hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel (independent) dapat mempengaruhi variabel lainnya (dependent).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Kabupaten Bungo (X)**

Variabel bebas (X) yang digunakan pada penelitian yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Bagaimana variabel tersebut diterapkan di lokus penelitian diukur menggunakan kuesioner yang telah disusun oleh penulis dengan indikator (Permadi, 2013)

1. Kesesuaian SAKD memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Prosedur Pencatatan Akuntansi Sesuai Standar Akuntansi Umum
3. Penyusunan Laporan Keuangan Dilaporkan Secara Periodik.

Berikut disertakan bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bungo melalui hasil jawaban responden terhadap kuesioner.

#### **A. Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Di bawah ini merupakan rekapitulasi analisis deskriptif variabel Standar Akuntansi Pemerintahan (X) berdasarkan jawaban responden dalam kuesioner penelitian berdasarkan 4 dimensi yakni Pengukuran, Pengakuan Pendapatan, Pengakuan Beban dan Pengungkapan Penuh.

**Tabel 3. 1**

**Distribusi Responden untuk Indikator Kesesuaian SAKD Yang Digunakan Memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							
No.	Pernyataan Tentang Kualitas LKPD	Jawaban					Jumlah
		SS	S	KS	TS	STS	
		5	4	3	2	1	
Relevan							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penerapan Sistem Akuntansi pada OPD saya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).	24	11	0	0	0	164
		59,10%	40,90%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
2	Transaksi diklasifikasi sesuai pos-pos yang semestinya.	21	14	0	0	0	161
		36,36%	45,45%	17,04%	1,15%	0,00%	100%
<b>Total</b>							<b>325</b>
<b>Persentase Total Skor Tanggapan Responden</b>							<b>92,90%</b>

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Tabel diatas memperlihatkan bahwa persentase skor jawaban responden pada indikator Kesesuaian SAKD memenuhi standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diambil dengan formula berikut ini :

$$\% \text{ Skor Jawaban Responden} = \frac{325}{5 \times 2 \times 35} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Jawaban Responden} = 92,90\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, presentase total sebesar 92,90% termasuk ke dalam kategori setuju. Hal tersebut dibuktikan 2 (dua) indikator indikator Kesesuaian SAKD memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah dilakukan dengan sangat baik oleh pegawai BPKAD Kabupaten Bungo.

**B. Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasar Standar Pencatatan Akuntansi Umum**

Indikator kedua yaitu prosedur pencatatan akuntansi harus berdasarkan pada standar pencatatan akuntansi umum. Hasil dari jawaban responden atas hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 2**

**Distribusi Responden untuk Indikator Prosedur Pencatatan Akuntansi**

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							Jumlah
No.	Pernyataan Tentang Kualitas LKPD	Jawaban					
		SS	S	KS	TS	STS	
		5	4	3	2	1	
<b>Andal</b>							
1	Setiap transaksi keuangan yang terjadi di OPD dianalisis.	25	10	0	0	0	165
		71,40%	28,60%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	Setiap transaksi yang terjadi di OPD di catat.	24	11	0	0	0	164
		68,50%	31,50%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	Transaksi yang dicatat disertai oleh bukti.	30	5	0	0	0	170
		85,70%	14,30%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	Pencatatan yang dilakukan pada OPD secara kronologis.	21	13	1	0	0	160
		60,00%	37,15%	2,85%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>Total</b>							<b>659</b>
<b>Persentase Total Skor Tanggapan Responden</b>							<b>94,10%</b>

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Tabel diatas memperlihatkan bahwa persentase skor jawaban responden pada indikator prosedur pencatatan akuntansi diambil dengan formula berikut ini :

$$\% \text{ Skor Jawaban Responden} = \frac{659}{5 \times 4 \times 35} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Jawaban Responden} = 94,10\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan, presentase total sebesar 94,10% termasuk ke dalam kategori setuju. Keempat indikator indikator prosedur pencatatan akuntansi yang telah dilakukan sudah sesuai dengan standar pencatatan akuntansi umum.

### C. Penyusunan Laporan Keuangan Dilaporkan Secara Periodik

Indikator ketiga yaitu penyusunan keuangan harus dilaporkan secara periodik. Hasil dari jawaban responden atas pernyataan indikator ketiga ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 3**

**Distribusi Resp. untuk Indikator Pelaporan Laporan Keuangan Secara Periodik**

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							Jumlah
No.	Pernyataan Tentang Kualitas LKPD	Jawaban					
		SS	S	KS	TS	STS	
		5	4	3	2	1	
<b>Dapat Dibandingkan</b>							
1	Laporan keuangan dibuat setiap periode akuntansi.	23	11	1	0	0	162
		65,70%	31,50%	2,80%	0,00%	0,00%	100,00%
2	Pelaporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik	24	11	0	0	0	164
		68,50%	31,50%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>Total</b>							<b>326</b>
<b>Persentase Total Skor Tanggapan Responden</b>							<b>93,10%</b>

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Tabel diatas memperlihatkan bahwa persentase skor jawaban responden pada indikator ketiga pelaporan laporan keuangan secara periodik diambil dengan formula berikut ini :

$$\% \text{ Skor Jawaban Responden} = \frac{326}{5 \times 2 \times 35} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Jawaban Responden} = 93,10\%$$

Persentase skor total sebesar 93,10% termasuk ke dalam kategori setuju. Hal tersebut dibuktikan 2 (dua) sub variabel atau indikator yang ketiga ini yaitu pelaporan laporan keuangan secara periodik telah dilakukan secara benar dan konsisten.

### 3.2 Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menggunakan indikator yang dikemukakan oleh (Sinurat, 2018) yaitu; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami.



Berdasar pada kuesioner yang telah disebarakan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bungo dengan jumlah responden sebanyak 35 pegawai dalam penelitian ini, berikut disertakan hasil tanggapan responden terkait variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

### A. Relevan

Indikator pertama pada variabel ini yaitu relevan, yang telah disusun dengan 6 (enam) sub indikator atau pernyataan untuk memvalidasi bahwa sistem yang dijalankan itu bersifat relevan. Berikut tanggapan responden terhadap sub variabel (indikator) relevan yang berisi enam pernyataan yang menjadi salah satu ukuran dalam penelitian ini:

**Tabel 3. 4**  
**Distribusi Responden untuk Indikator Relevan**

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							
No.	Pernyataan Tentang Kualitas LKPD	Jawaban					Jumlah
		SS	S	KS	TS	STS	
		5	4	3	2	1	
Relevan							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan SAP yang mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan	19	16	0	0	0	159
		54,30%	45,70%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
2	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan koreksi ekspektasi dimasa lalu	19	16	0	0	0	159
		54,30%	45,70%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
3	Laporan keuangan menyediakan Informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang	18	17	0	0	0	158
		51,40%	48,60%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
4	Penyajian laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi	29	6	0	0	0	169
		82,85%	17,15%	0,00%	0,00%	0,00%	100%

5	Laporan keuangan menghasilkan Informasi yang mencakup Informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan	24	10	1	0	0	163
		68,60%	28,60%	2,80%	0,00%	0,00%	100%
6	Laporan keuangan disajikan secara lengkap	26	9	0	0	0	166
		74,30%	25,70%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
<b>Total</b>							<b>974</b>
<b>Persentase Total Skor Tanggapan Responden</b>							<b>92,80%</b>

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Persentase skor hasil jawaban responden pada indikator relevan diperoleh dari rumus berikut ini:

$$\% \text{ Skor Jawaban Responden} = \frac{974}{5 \times 6 \times 35} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Jawaban Responden} = 92,80\%$$

Persentase total sebesar 92,80% termasuk ke dalam kategori setuju. Keenam indikator tersebut telah dilakukan dengan baik.

## B. Andal

Indikator kedua pada variabel terikat yaitu andal.

Berikut tanggapan responden terhadap sub variabel (indikator) andal yang menjadi ukuran dalam penelitian ini:

**Tabel 3. 5**

**Distribusi Responden untuk Indikator Andal**

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							Jumlah
No.	Pernyataan Tentang Kualitas LKPD	Jawaban					
		SS	S	KS	TS	STS	
		5	4	3	2	1	
<b>Andal</b>							
1	Transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material	23	12	0	0	0	163
		65,70%	34,30%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

2	Transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan	22	13	0	0	0	162
		62,90%	37,10%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	Laporan keuangan menyajikan informasi yang diarahkan untuk Kebutuhan umum	23	12	0	0	0	163
		65,70%	34,30%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	Laporan keuangan yang disajikan tidak berpihak pada kebutuhan khusus	21	13	1	0	0	160
		60,00%	37,20%	2,80%	0,00%	0,00%	100,00%
5	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan dapat diuji	26	9	0	0	0	166
		74,30%	25,70%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak berbeda akan mewujudkan simpulan yang berbeda	16	18	1	0	0	155
		45,70%	51,50%	2,80%	0,00%	0,00%	100,00%
7	Setiap informasi dalam laporan keuangan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dalam interpretasi dan penggunaan informasi dapat dicegah	24	11	0	0	0	164
		68,60%	31,40%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>Total</b>							<b>1133</b>
<b>Persentase Total Skor Tanggapan Responden</b>							<b>92,50%</b>

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Persentase untuk skor jawaban responden pada indikator andal diperoleh dari rumus berikut ini:

$$\% \text{ Skor Jawaban Responden} = \frac{1133}{5 \times 7 \times 35} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Jawaban Responden} = 92,50\%$$

Berdasar nilai perhitungan diatas, persentase total sebesar 92,50% termasuk ke dalam kategori setuju. Hal ini dibuktikan 7 (tujuh) indikator indikator andal telah dilakukan dengan sangat baik oleh pegawai BPKAD Kabupaten Bungo.

### C. Dapat Dibandingkan

Indikator berikutnya atau ketiga yaitu indikator dapat dibandingkan. Indikator ini diukur menggunakan jawaban responden dengan 3 (tiga) sub indikator atau pernyataan yang telah disusun.

Berikut tanggapan responden terhadap indikator dapat dibandingkan yang menjadi ukuran dalam penelitian ini:

**Tabel 3. 6**  
**Distribusi Resp. untuk Indikator Dapat Dibandingkan**

<b>Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</b>							<b>Jumlah</b>
<b>No.</b>	<b>Pernyataan Tentang Kualitas LKPD</b>	<b>Jawaban</b>					
		<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>KS</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>	
		<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
<b>Dapat Dibandingkan</b>							
1	Informas iyang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	20	15	0	0	0	160
		57,10	42,90%	0,00%	0,00%	0,00%	
2	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dimasa yang akan datang	22	12	1	0	0	161
		62,80%	34,30%	2,90%	0,00%	0,00%	
3	Laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama	23	12	0	0	0	163
		65,70%	34,30%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Total</b>							<b>484</b>
<b>Persentase Total Skor Tanggapan Responden</b>							<b>92,20%</b>

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Tabel diatas memperlihatkan bahwa persentase untuk skor jawaban responden pada indikator dapat dibandingkan diperoleh dari rumus berikut ini:

$$\% \text{ Skor Jawaban Responden} = \frac{484}{5 \times 3 \times 35} \times 100\%$$

% Skor Jawaban Responden = 92,20%

Skor persentase total sebesar 92,20% termasuk ke dalam kategori setuju. Hal ini dibuktikan oleh 3 (tiga) indikator dapat dibandingkan yang telah dilakukan dengan sangat baik oleh pegawai BPKAD Kabupaten Bungo.

#### D. Dapat Dipahami

Indikator terakhir pada variabel Y yaitu Dapat Diapahami. Berikut tanggapan responden terhadap sub variabel (indikator) Dapat Dipahami yang menjadi ukuran dalam penelitian ini:

**Tabel 3. 7**  
**Distribusi Responden untuk Indikator Dapat Dipahami**

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah							Jumlah
No.	Pernyataan Tentang Kualitas LKPD	Jawaban					
		SS	S	KS	TS	STS	
		5	4	3	2	1	
<b>Dapat Dipahami</b>							
1	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi sudah disajikan bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna	20	15	0	0	0	160
		57,10%	42,90%	0,0%	0,00%	0,00%	100,00%
2	Laporan keuangan yang disusun tidak membingungkan dan disesuaikan dengan pengetahuan para pengguna	25	9	1	0	0	164
		71,40%	26,80%	2,80%	0,00%	0,00%	100,00%
3	Laporan keuangan disusun sesuai dengan kenyataan dan apa adanya	27	8	0	0	0	167
		77,10%	22,90%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	Laporan keuangan mudah dimengerti tanpa adanya penjelasan tambahan secara lisan	21	14	0	0	0	161
		60,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
<b>Total</b>							<b>652</b>
<b>Persentase Total Skor Tanggapan Responden</b>							<b>93,10%</b>

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2023

Tabel diatas memperlihatkan bahwa persentase skor jawaban responden pada indikator dapat dipahami diperoleh dari rumus berikut ini :

$$\% \text{ Skor Jawaban Responden} = \frac{652}{5 \times 4 \times 35} \times 100\%$$

$$\% \text{ Skor Jawaban Responden} = 93,10\%$$

Persentase total sebesar 93,10% termasuk ke dalam kategori setuju. Hal ini dibuktikan 4 (empat) indikator dapat dipahami yang telah dilakukan dengan sangat baik oleh pegawai BPKAD Kabupaten Bungo.

### 3.3 Pengujian Hipotesis

Data di analisis menggunakan teknik uji asumsi klasik, kemudian terlihat bahwa data memenuhi syarat dan laik untuk maka selanjutnya dapat di uji apakah data penelitian ini dapat memenuhi atau menolak hipotesis yang telah dibuat.

#### a. Regresi Linear Sederhana

Persamaan Regresi Linear Sederhana mendapatkan nilai  $Y = 23.781 + 1.840X$   $a = 23.781$ , artinya suatu bilangan konstan yang tidak dipengaruhi oleh variabel SAKD atau jika tidak ada SAKD maka nilai konsisten Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah 23.781.  $b = 1.840$ , artinya bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD, dimana pertambahan 1% pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah maka Kualitas LKPD akan meningkat sebesar 1.840.

#### b. Uji signifikansi

Uji signifikansi dilakukan untuk melihat apakah variabel bebas dari penelitian ini memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Tabel Coefficients hasil olahan SPSS memperlihatkan nilai Signifikansi variabel (X) sebesar 0,00. Nilai Sig.  $0,00 < \text{Nilai probabilitas } 0,05$ , artinya bahwa  $H_1$  diterima, variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

#### c. Koefisien Determinasi

Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas LKPD (Y) Kabupaten Bungo, maka selanjutnya dicari seberapa besar sumbangan pengaruh yang diberikan oleh variabel X tersebut terhadap variabel Y. Dapat ditarik kesimpulan setelah melihat nilai  $R = 0,777$  yang mengakibatkan nilai R Square menjadi  $0,777 \times 0,777 = 0,604$ , artinya bahwa terdapat hubungan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas LKPD yang sangat kuat. Nilai kontribusi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang mempengaruhi Kualitas LKPD sebesar 60,4%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 39,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel yang diteliti.

### 3.4 Diskusi temuan Utama Penelitian

Ditemukan dari hasil uji penelitian bahwa semakin diterapkan sistem akuntansi keuangan daerah maka semakin berkualitas LKPD yang dihasilkan. Kemudian hasil dari penelitian ini

membuka fakta ilmiah yang telah teruji bahwa di antara kedua variabel ini memiliki korelasi yang signifikan. Signifikansi ini memiliki makna bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat krusial dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Tabel 3.8**

**Opini BPK Terhadap LKPD Kab. Bungo**

<b>Tahun</b>	<b>Opini BPK</b>
2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2020	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

*Sumber: Arsip BPKAD Bungo, Diolah Oleh Penulis, 2022.*

Berdasarkan temuan dan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo harus mampu menerapkan SAKD dengan maksimal untuk mempertahankan kualitas LKPD sehingga mampu konsisten mendapatkan opini WTP yang diberikan oleh BPK.

**IV. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat diuraikan sebuah kesimpulan mengenai pembahasan Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sebagai berikut :

**Keterbatasan Penelitian.** Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran atas baik buruknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo.

**Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*).** Perlunya memperluas ruang lingkup penelitian ataupun variabel yang digunakan tujuan lain dapat menemukan keterkaitan variabel lain yang mempunyai pengaruh kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diluar variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

**V. Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terima kasih ini ditunjukkan terutama pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo beserta seluruh staff yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam melakukan penelitian serta seluruh pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

## VI. Daftar Pustaka

- Ansir Launtu, Jurnal Akuntansi Volume 18 No 1, April 2021, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.
- Fatimah, S. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Sriwijaya: Palembang.
- Kartika Dewi Indrayani, Harjanti Widiastuti, Jurnal Akuntansi dan Bisnis Volume 4 No 1, Juli 2022, Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa tengah).
- Mutmainnah. 2020. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemda Kabupaten Barru)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Prabangsari, A., P. 2018. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Standar Akuntansi Berbasis AkruaL Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Badan dan Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Permadi, Angga. 2013. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung: Skripsi Akuntansi Pemerintah.
- Sinurat, Marja. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Research and Development*. Bandung: Alfabeta.